
REPRESENTASI ISU DINASTI POLITIK DALAM KONTESTASI PILPRES 2024 PADA KARTUN EDITORIAL SAMPUL MAJALAH TEMPO

Annisa Yasmin¹, Yayuk Lestari², Rinaldi³

¹⁻³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: lestariyayukizza@gmail.com

Diterima: 11 Februari 2025

Direvisi: 23 Februari 2025

Disetujui: 25 Maret 2025

Abstrak

Isu dinasti politik yang menyeret nama Presiden Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu isu yang paling sering diperbincangkan selama kontestasi pilpres 2024, sehingga banyak media massa membahas isu ini termasuk Tempo pada majalahnya, terutama kartun editorial di sampul majalahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana representasi isu dinasti politik pada kartun editorial Majalah Tempo. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce dengan data penelitian yang didapatkan melalui observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tempo merepresentasikan sebagai sesuatu yang dimulai dari ambisi dari dalam dan telah direncanakan dari jauh hari, dengan mengandalkan dominasi penguasa dan kerja sama para elite melalui penyelewengan tugas dan kekuasaan.

Kata Kunci: Dinasti Politik, Kartun Editorial, Kontestasi Pilpres 2024, Representasi, Tempo.

Abstract

The political dynasty issue that mentioned President Jokowi and his son, Gibran Rakabuming Raka, was one of the most discussed issue during 2024 presidential election contest. Lots of mass media decided to wrote or discussed the issue including Tempo through its magazine, especially by the editorial cartoon at Tempo's cover. This study aims to analyze how representation of the political dynasty at editorial cartoon of Tempo's magazine. The research was done qualitatively with Charles Sanders Peirce's Semiotic Theory used research data that had obtained through observation and documentations. The results show that Tempo represents the issue as started from ambition or desire and had planned from a long time ago, relying on the dominance of the rulers and the cooperation of the elites through abuse of power and duties.

Keywords: 2024 Presidential Election Contest, Editorial Cartoon, Political Dynasty, Representation, Tempo.

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai praktik dinasti politik kembali menjadi sorotan utama dalam pemilu presiden 2024. Perhatian ini meningkat setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023, yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut memperbolehkan individu di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri, asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah.

Putusan ini memicu kontroversi karena memungkinkan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Joko Widodo, untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam kontestasi pilpres. Keterlibatan Anwar Usman, yang merupakan ipar Presiden Jokowi, dalam proses pengambilan keputusan MK 90, memperkeruh persepsi publik dan melahirkan kecurigaan akan adanya agenda politik untuk memperpanjang pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi melalui jalur keluarga.

Sebagai negara yang menganut sistem republik demokratis, kemunculan isu dinasti politik di Indonesia—terutama dalam konteks pencalonan Gibran—memunculkan kekhawatiran publik. Dinasti politik dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi karena dapat melemahkan mekanisme pengawasan, memperbesar peluang korupsi, serta mempersempit akses terhadap kekuasaan bagi masyarakat luas. Selain itu, hal ini juga dapat memperkuat praktik oligarki yang menguntungkan kelompok terbatas. Dalam tataran etika politik, dinasti kekuasaan dianggap

mencederai moralitas publik (Riyanda, 2020).

Akibatnya, isu ini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat menjelang pemilu. Media massa nasional hingga internasional memberikan sorotan khusus, baik melalui laporan mendalam maupun melalui bentuk ekspresi visual seperti kartun editorial. Dalam era media modern, visualisasi isu melalui kartun editorial menjadi metode alternatif yang efektif dalam menyampaikan kritik sosial dan politik.

Kartun editorial, menurut Salam (2017), merupakan media visual yang digunakan untuk menyalurkan opini redaksi atas isu-isu tertentu. Gambar tersebut biasanya muncul di media cetak seperti surat kabar dan majalah. Menurut Sobur (2017), fungsi utama kartun editorial adalah menyindir serta memberikan peringatan. Maka dari itu, keberadaannya dalam dunia jurnalistik memiliki posisi penting sebagai representasi opini dalam bentuk gambar (Ahdiyati, 2021).

Kartun editorial merupakan salah satu bentuk komunikasi visual yang sarat makna dan memiliki daya kritis tinggi. Kartun semacam ini tidak sekadar menyajikan hiburan visual, tetapi juga berfungsi sebagai medium opini dan ekspresi ideologis terhadap situasi sosial-politik yang sedang berlangsung. Salah satu media yang secara konsisten memanfaatkan kartun editorial sebagai alat kritik adalah *Majalah Tempo*. Media ini menjadikan kartun sebagai bagian integral dari konten opini, baik dalam bentuk pelengkap tajuk rencana maupun sebagai elemen utama pada sampul depan. Gaya editorial *Tempo* yang dikenal tajam, satiris, dan penuh sindiran politik menjadikan

kartun-kartunnya sebagai bentuk komunikasi politik yang kuat dan bernas.

Dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, terutama setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023 yang memperlonggar syarat usia bagi calon kepala daerah atau wakil presiden dengan pengalaman sebagai kepala daerah, isu dinasti politik mengemuka dengan sangat kuat. *Tempo* secara aktif merespons perkembangan ini melalui visualisasi kartun editorial pada beberapa edisinya. Sampul majalah yang menampilkan simbol-simbol visual seperti bayangan, mahkota, siluet, atau gestur khas figur tertentu menjadi narasi kritik yang gamblang terhadap peran kekuasaan dalam melanggengkan dinasti politik. Visual tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk konstruksi wacana yang menunjukkan bagaimana media memaknai relasi antara kekuasaan politik dan legitimasi publik.

Media massa, dalam hal ini berfungsi bukan sekadar sebagai saluran informasi, melainkan sebagai aktor kultural yang turut membentuk dan menyebarkan nilai-nilai ideologis tertentu kepada masyarakat (Muzakir, 2020). Melalui proses representasi, media tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, melainkan juga memproduksi makna terhadap peristiwa sosial, politik, dan budaya. Namun, representasi tersebut tidaklah netral. Seperti yang dikemukakan Burton (2015), media bekerja dalam ruang yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, kepentingan ekonomi-politik, serta ideologi tertentu. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh media selalu

melalui proses penyaringan dan pemaknaan yang khas.

Dalam studi komunikasi, representasi dipahami sebagai proses di mana tanda-tanda (baik verbal maupun visual) digunakan untuk membentuk makna. Bahasa, citra, suara, serta simbol visual lainnya tidak hanya merepresentasikan realitas, tetapi juga menciptakan realitas versi media. Roikan (2020) menegaskan bahwa kartun editorial merupakan salah satu bentuk representasi visual yang mampu merefleksikan situasi sosial-politik tertentu secara ringkas, tajam, dan komunikatif. Oleh karena itu, kartun editorial yang dimuat oleh *Tempo* dalam rangka merespons isu dinasti politik tidak bisa dipandang sebagai gambar semata, melainkan sebagai konstruksi wacana yang menunjukkan posisi, sikap, dan ideologi media terhadap dinamika politik nasional.

Untuk mengetahui bagaimana *Tempo* menyampaikan kritik sosial dan membangun representasi terhadap isu dinasti politik melalui kartun editorialnya, pendekatan semiotika dapat digunakan sebagai alat analisis visual. John Fiske (dalam Vera, 2014) menyatakan bahwa semiotika merupakan studi tentang tanda dan bagaimana tanda tersebut menyampaikan makna. Media menyusun pesan dan menyampaikannya kepada publik melalui berbagai simbol, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun media audiovisual lainnya. Makna dari tanda-tanda tersebut dapat dianalisis melalui asosiasi bentuk, hubungan sebab-akibat, serta pemahaman kolektif masyarakat atas simbol-simbol tersebut. Proses analisis ini memungkinkan kita memahami bagaimana media memaknai dan menyampaikan suatu

isu kepada audiensnya. Oleh sebab itu, melalui metode semiotika, dapat diketahui bagaimana Tempo mengangkat sekaligus mengkritisi praktik dinasti politik melalui representasi visual dalam bentuk kartun editorial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian semiotika terhadap sampul depan Majalah Tempo menjadi penting untuk mengkaji bagaimana media tersebut menampilkan representasi terkait dinasti politik dalam rangkaian pemilu 2024. Studi ini menggarisbawahi bahwa kartun editorial tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika atau pelengkap editorial, tetapi juga sebagai pernyataan sikap editorial terhadap suatu isu melalui representasi simbolik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena analisis terhadap tanda-tanda, sebagaimana dijelaskan oleh Vera (2014), bersifat subjektif, selaras dengan karakteristik dasar metode kualitatif yang juga menekankan pada pemaknaan subjektif. Objek utama dalam penelitian ini adalah tujuh sampul Majalah Tempo yang menampilkan ilustrasi terkait isu dinasti politik, diterbitkan antara Oktober 2023 hingga Januari 2024.

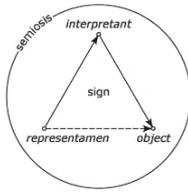
Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan dokumentasi, yang mencakup sumber data primer maupun sekunder. Ketujuh sampul Tempo tersebut diunduh dari situs resmi Majalah Tempo dan dijadikan sebagai data primer. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti artikel ilmiah,

laporan berita, serta jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Proses analisis dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis dan berlangsung paralel dengan pengumpulan data (Stake dalam Haryono, 2021). Dengan kata lain, peneliti dapat mulai melakukan interpretasi terhadap data seiring dengan berlangsungnya proses observasi, tanpa harus menunggu keseluruhan data terkumpul terlebih dahulu.

Analisis dilakukan menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce, yang menjadi kerangka untuk memahami bagaimana Tempo menyampaikan representasi isu dinasti politik melalui kartun editorial di sampul majalah. Menurut Barthes dalam Sobur (2017), semiotika mengkaji bagaimana manusia memberi makna terhadap sistem tanda yang ada. Tanda-tanda tersebut tidak hanya berdiri sendiri, melainkan juga menjadi simbol atas ide tertentu serta merefleksikan hubungan makna antar elemen (Littlejohn, 2017).

Charles Sanders Peirce dikenal sebagai tokoh penting dalam perkembangan studi semiotika. Teorinya dianggap sebagai teori besar (*grand theory*) karena cakupan analisisnya melibatkan seluruh sistem penandaan (Wibowo, 2013). Menurut Peirce, tanda merupakan sesuatu yang merepresentasikan objek dalam konteks tertentu. Ia menjabarkan tiga elemen dalam sistem tanda—yakni representamen (tanda fisik), objek (hal yang diwakili), dan interpretan (pemaknaan)—yang saling berinteraksi dalam struktur hubungan triadik.



Gambar 1 Hubungan Triadik Semiotika Peirce
(sumber: Wibowo, 2013)

Dalam pandangan Fiske (2016), representamen merujuk pada bentuk fisik suatu tanda yang dapat ditangkap oleh pancaindra. Objek adalah hal yang menjadi rujukan dari representamen tersebut, dan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: ikon, indeks, serta simbol. Sementara itu, interpretan merupakan hasil penafsiran yang terbentuk dalam pikiran sebagai respon terhadap relasi antara representamen dan objek. Interpretan ini juga bisa dimaknai sebagai hasil pemrosesan mental terhadap suatu tanda hingga menghasilkan makna tertentu (Ramadhani et al., 2023).

Dalam kerangka semiotika Peirce, ketiga elemen ini—representamen, objek, dan interpretan—berhubungan erat dalam proses yang disebut semiosis atau pembentukan makna. Semiosis terjadi melalui tiga tahap utama: pertama, individu mengenali representamen melalui alat indera; kedua, menghubungkan representamen tersebut dengan objek berdasarkan pengalaman kognitif; dan ketiga, menginterpretasikan objek untuk memperoleh makna tertentu (Rambe et al., 2022).

Setelah tahap analisis selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan validasi data guna menjamin keabsahan temuan. Dalam pendekatan kualitatif, data dianggap sah apabila hasil temuan sesuai dengan realitas objek yang dikaji (Sugiyono, 2019). Namun, dalam penelitian kualitatif, realitas

bukanlah sesuatu yang tunggal, melainkan terbentuk dari berbagai perspektif sosial dan individu. Untuk mendukung validitas, peneliti menggunakan pendekatan intertekstual.

Mengacu pada Kristeva dalam Sobur (2017), intertekstualitas menunjukkan bahwa suatu teks selalu memiliki keterkaitan dengan teks lain. Setiap teks dapat dianggap sebagai mosaik yang berasal dari berbagai sumber teks lain yang telah dimodifikasi atau dikombinasikan. Oleh sebab itu, intertekstualitas digunakan dalam studi ini sebagai salah satu metode untuk menguji validitas data, khususnya dalam konteks analisis tanda dalam semiotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Dominasi Penguasa untuk Mewujudkan Dinasti Politik

Tanda



Gambar 2 Edisi 16-22 Oktober 2023

Ilustrasi seorang pria mengenakan kemeja putih disorot cahaya dan menimbulkan bayangan, disertai tulisan “Gerilya untuk Putra Mahkota”

Objek	Gibran Rakabuming Raka digambarkan mengenakan kemeja putih dengan bayangan yang menyerupai siluet Presiden Joko Widodo, bukan dirinya sendiri. Visual tersebut merefleksikan hubungan simbolik antara Gibran sebagai anak sulung dan Presiden Jokowi sebagai figur sentral kekuasaan, yang dalam konteks ini dianalogikan sebagai “Raja”, sementara Gibran diasosiasikan sebagai “Putera Mahkota”.
Interpretan	Melalui representasi visual ini, <i>Tempo</i> menyampaikan pesan bahwa keterlibatan Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 erat kaitannya dengan pengaruh politik yang dimiliki oleh ayahnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Judul “Gerilya untuk Putera Mahkota” mencerminkan narasi mengenai upaya sistematis dalam mengamankan posisi strategis bagi Gibran melalui legalitas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023.

Pada edisi 16–22 Oktober 2023, sampul depan Majalah *Tempo* menampilkan Gibran dengan bayangan menyerupai Jokowi, seakan menekankan bahwa Gibran memperoleh keuntungan politik karena berada dalam "bayang-bayang" sang ayah. Status Gibran sebagai putra sulung Presiden memberi keuntungan simbolik yang memperkuat posisinya,

khususnya dalam ranah politik nasional. Walaupun tingkat keterpilihan Gibran sebagai calon wakil presiden saat itu masih rendah (di bawah 10 persen), keberadaannya sudah cukup menjadi indikator arah dukungan Jokowi dalam Pemilu 2024.

Wajah Gibran yang terlihat tenang dalam ilustrasi tersebut mencerminkan keyakinannya terhadap pengaruh besar yang dimiliki Jokowi, sehingga ia tampak tidak merasa terancam atau cemas. Penggambaran dominasi kekuasaan dalam konteks ini merujuk pada kemampuan seorang pemimpin, dalam hal ini Jokowi, untuk mengarahkan dan mengontrol situasi politik sesuai kepentingannya. *Tempo* menyoroti bagaimana isu politik dinasti sangat berkaitan erat dengan kekuasaan Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

Dampak dari dominasi tersebut tampak jelas dalam kemunculan Gibran sebagai bagian dari dinamika Pilpres 2024, terlebih setelah adanya Putusan MK Nomor 90. Walaupun pengalaman politiknya masih minim, penerimaan Gibran oleh partai koalisi sebagai calon wakil presiden turut menunjukkan besarnya pengaruh Jokowi dalam membentuk konstelasi politik nasional.

<p>Tanda</p>	 <p>Gambar 3 Edisi 15-21 Januari 2024</p> <p>Ilustrasi pada sampul memperlihatkan seorang pria yang sedang memompa sebuah kotak besar, sementara dua pria lain dengan perbedaan ukuran tubuh mencolok berdiri di atas kotak tersebut dan memberikan semangat kepada sang pemompa.</p>	<p>kritik terhadap peran aktif Jokowi dalam mengarahkan opini publik untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran, alih-alih membiarkan keduanya membangun elektabilitas mereka secara mandiri. Dalam visual tersebut, Gibran dan Prabowo terlihat memilih untuk menyemangati Jokowi, bukan melakukan upaya sendiri, karena memahami bahwa dukungan simbolik dan politik dari Jokowi sangat menentukan potensi kemenangan mereka.</p>
<p>Objek</p>	<p>Dalam konteks politik yang dibawa oleh <i>Tempo</i>, tokoh pemompa digambarkan sebagai Presiden Jokowi, yang sedang berupaya “membentuk” kotak suara pemilu. Sementara itu, dua tokoh yang berdiri di atasnya diidentifikasi sebagai Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto.</p>	<p>Elektabilitas merupakan konsep sentral dalam studi politik elektoral yang merujuk pada tingkat dukungan atau potensi keterpilihan seorang aktor politik di mata publik. Secara konseptual, elektabilitas tidak sekadar mengindikasikan popularitas, tetapi juga merefleksikan persepsi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas seorang kandidat dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Setiawan & Chumaeson, 2022). Dalam praktiknya, elektabilitas sering dijadikan indikator penting dalam memetakan peluang keberhasilan kandidat dalam pemilihan umum. Meski demikian, perlu dicatat bahwa data survei yang menyajikan angka elektabilitas memiliki keterbatasan metodologis dan tidak selalu mencerminkan realitas politik secara absolut. Faktor-faktor seperti bias</p>
<p>Interpretasi</p>	<p>Beban dari kedua tokoh tersebut yang berdiri di atas kotak menjadikan usaha Jokowi tampak semakin berat. Gambar ini dimaknai sebagai</p>	

responden, metode sampling, dan dinamika opini publik yang fluktuatif dapat mempengaruhi validitas data tersebut (Setiawan & Girsang, 2024). Namun demikian, survei elektabilitas tetap relevan sebagai alat analisis awal untuk memahami tren dukungan masyarakat dan mengidentifikasi momentum politik dalam kontestasi elektoral.

Dalam konteks politik dinasti, fenomena elektabilitas tidak dapat dilepaskan dari keberadaan figur-figur politik dominan yang menguasai modal politik dalam jangka waktu yang panjang. Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai aktor politik sentral yang telah menjabat selama dua periode, merupakan contoh nyata dari akumulasi modal politik yang strategis dan berpengaruh dalam kerangka politik dinasti. Menurut perspektif Francis Fukuyama, modal politik dapat dipahami sebagai akumulasi nilai-nilai sosial, sumber daya informasi, jaringan relasional, dan legitimasi yang dimiliki oleh aktor politik untuk membangun dan menguatkan aliansi strategis dalam arena sosial-politik (Rusman et al., 2022). Modal politik ini bersifat dinamis dan menjadi instrumen penting dalam mereproduksi kekuasaan serta memperluas pengaruh politik di berbagai lapisan masyarakat.

Pengalaman politik panjang Jokowi yang dimulai dari proses kaderisasi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kemudian memimpin Surakarta sebagai wali kota, menjabat Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya dua kali memimpin Indonesia sebagai Presiden, telah memperkuat jejaring sosial dan institusionalnya secara signifikan. Jejaring ini meliputi hubungan dengan elit politik, simpul-simpul relawan berbasis

komunitas, hingga jaringan pelaku ekonomi yang saling terhubung dalam ekosistem kekuasaan. Coppenolle (2014) mengemukakan bahwa penguasaan kekuasaan dalam jangka panjang dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi praktik politik dinasti, di mana modal politik yang telah terkonsolidasi mampu membentuk struktur patronase dan mempengaruhi mekanisme reproduksi kekuasaan secara vertikal dan horizontal.

Dalam Pilpres 2024, posisi strategis Jokowi sebagai aktor sentral dan simbol legitimasi politik nasional dimanfaatkan secara instrumental untuk mendukung pasangan calon Prabowo-Gibran. Tingginya tingkat penerimaan publik terhadap Jokowi sebagai pemimpin nasional berkontribusi signifikan terhadap peningkatan elektabilitas pasangan tersebut. Dukungan Jokowi bukan hanya sebagai endorsement formal, melainkan juga berperan sebagai modal simbolik yang mampu memobilisasi basis massa di berbagai segmen sosial-politik, termasuk simpatisan PDIP, kelompok relawan, dan jaringan ekonomi yang selama ini menjadi basis pendukungnya (Tempo, 15 Oktober 2023). Hal ini sejalan dengan teori modal sosial yang menegaskan pentingnya jaringan interpersonal dan simbolik dalam menggerakkan dukungan politik (Putnam, 2000).

Secara lebih luas, fenomena ini mencerminkan bagaimana politik dinasti dapat beroperasi dalam konteks demokrasi elektoral kontemporer di Indonesia, di mana modal politik dan jaringan kekuasaan tidak hanya mempengaruhi proses seleksi kandidat tetapi juga memengaruhi dinamika persepsi dan pilihan pemilih.

Adanya Kerjasama Antar Elite untuk Mewujudkan Dinasti Politik

Tanda	 <p>Gambar 4 Edisi 23-29 Oktober 2023</p> <p>Seorang pria mengenakan jubah hakim menghentakkan palu ke meja hingga menimbulkan retakan yang membentuk pola menyerupai wajah manusia. Ilustrasi berjudul <i>"Skandal di Pengadilan Keluarga"</i> ini didominasi oleh nuansa warna hitam.</p>
Objek	<p>Dalam ilustrasi, Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terlihat mengetukkan palu hakim ke meja hingga menciptakan retakan berbentuk wajah Gibran.</p>
Interpretasi	<p>Tempo menyindir Mahkamah Konstitusi lewat karya berjudul <i>"Skandal Mahkamah Keluarga"</i>, mengkritik putusan MK nomor 90. Istilah "Mahkamah Keluarga" digunakan karena hubungan keluarga antara Anwar Usman dengan Presiden Jokowi, yang juga merupakan</p>

	<p>paman dari Gibran. Dominasi warna hitam pada gambar tersebut menyimbolkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh Anwar Usman, yang dianggap menjadikan MK sebagai alat kepentingan keluarga lewat putusan tersebut.</p>
--	--

Sebelum mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka terbentur oleh ketentuan batas usia minimal 40 tahun yang menjadi syarat konstitusional pencalonan. Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menerbitkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menambahkan frasa pengecualian, yaitu bahwa individu yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah dapat mencalonkan diri meskipun belum mencapai usia tersebut. Permadi dan Wardhana (2023) menyoroti bahwa putusan ini sarat konflik kepentingan, mengingat peran aktif Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga langsung sebagai ipar Presiden Jokowi sekaligus paman dari Gibran.

Ilustrasi yang ditampilkan dalam edisi majalah Tempo menyampaikan kritik tajam terhadap putusan tersebut. Gambar yang menunjukkan Anwar Usman mengetukkan palu hingga menimbulkan retakan berbentuk wajah Gibran dapat ditafsirkan sebagai simbol keterlibatan lembaga yudikatif dalam memperlancar jalan politik anggota keluarga presiden. Representasi visual ini mengimplikasikan bahwa Putusan MK 90 bukan sekadar keputusan hukum, melainkan bagian dari

mekanisme yang diduga turut melanggengkan praktik politik dinasti. Tempo melalui visual dan narasi tersebut secara eksplisit menilai bahwa independensi MK telah terganggu oleh kepentingan kekuasaan personal dan kekeluargaan.

Tanda	 <p>Gambar 5 Edisi 29 Januari – 4 Februari 2024 Tiga pria mengenakan pakaian awal abad 20 di tengah jalan dan suasana yang cokelat. Tulisan “Operator Jokowi” menemani ilustrasi.</p>
Objek	Jokowi, Gibran, dan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengenakan pakaian seperti keluarga Shelby pada film <i>Peaky Blinders</i> .

Interpretan	Aksi Jokowi dalam membentuk dinasti politik yang melibatkan beberapa pihak elite (seperti Pratikno) dimaknai Tempo seperti keluarga Shelby yang berambisi untuk meraih kekuasaan dan kekayaan dengan cara sekotor apa pun. Orang-orang yang membantu dinasti politik Jokowi disebut sebagai “Operator Jokowi”
-------------	---

Istilah "operator" merujuk pada individu yang memiliki tugas untuk menjalankan, menjaga, serta melayani suatu sistem atau proses. Dalam konteks frasa "Operator Jokowi" yang diangkat oleh Tempo, istilah ini dialamatkan kepada Pratikno, Menteri Sekretaris Negara sekaligus sosok yang dianggap sebagai tangan kanan Presiden Jokowi. Peran Pratikno tidak terbatas pada pengelolaan administratif kenegaraan, melainkan juga dikaitkan dengan upaya mempertahankan kekuasaan melalui strategi politik berbasis hubungan kekerabatan. Tempo menggarisbawahi bahwa Pratikno diduga memiliki kontribusi signifikan dalam memuluskan proses politik dinasti, termasuk dengan membujuk hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyetujui Putusan MK Nomor 90, serta menggalang dukungan dari partai-partai politik koalisi untuk menerima Gibran sebagai calon wakil presiden.

Visual pada sampul majalah menampilkan Jokowi, Pratikno, dan Gibran dalam busana ala keluarga Shelby—tokoh fiktif yang identik dengan

praktik mafia—sebagai simbol kritik terhadap dugaan manipulasi kekuasaan oleh lingkaran terdekat presiden. Tempo menggunakan elemen visual ini untuk menggambarkan bahwa tindakan Presiden Jokowi dalam memperpanjang kekuasaan melalui pencalonan Gibran dinilai sebagai praktik yang tidak etis dan menyimpang. Dominasi warna cokelat dalam ilustrasi menambah kekuatan pesan tersebut, karena menurut Hendratman (2015), warna cokelat dapat merepresentasikan hal-hal yang bersifat kotor, pesimistis, konservatif, dan intoleran.

Lebih dari sekadar menyoroti keberhasilan Gibran melampaui batas konstitusional melalui Putusan MK, laporan ini juga menekankan keterlibatan aktor-aktor strategis dalam upaya mengamankan kesinambungan kekuasaan, menjadikan proses politik ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga sarat kepentingan.

Terjadi Praktik Penyelewengan Tugas dan Kekuasaan

Tanda	 <p>Gambar 6 Edisi 13-19 November 2023 Seorang pria berdiri di atas puing sambil melambaikan kepada pria berbaju hakim yang duduk di salah satu puing memegang palu raksasa. Terdapat tulisan “Ugal-ugalan Paman Gibran”</p>
Objek	Gibran berdiri di atas reruntuhan pilar gedung Mahkamah Konstitusi sambil melambaikan tangan kepada Anwar Usman yang duduk di salah satu reruntuhan gedung.

Interpretan	Visual tersebut dapat diartikan bahwa Gibran menyampaikan rasa terima kasih kepada pamannya, Anwar Usman, yang diduga telah merusak integritas Mahkamah Konstitusi demi mempermudah jalannya menjadi calon wakil presiden. Reruntuhan pilar Mahkamah Konstitusi yang membentuk tangga melambangkan bahwa jenjang karier Gibran meningkat akibat kerusakan pada lembaga tersebut. Tulisan “Ugal-ugalan Paman Gibran” mengindikasikan adanya tindakan kasar yang dilakukan oleh Anwar Usman terhadap Mahkamah Konstitusi melalui penggunaan palu raksasa miliknya.
-------------	--

Salah satu bentuk pelanggaran serius yang dilakukan oleh Anwar Usman, sebagaimana disorot dalam sejumlah sumber, adalah pengingkaran terhadap prinsip etika hakim, khususnya terkait dengan ketidakberpihakan. Etika tersebut secara eksplisit melarang seorang hakim untuk menangani perkara yang memiliki konflik kepentingan, termasuk apabila perkara tersebut melibatkan anggota keluarganya sendiri (Permadi & Wardhana, 2023). Dalam konteks ini, kedekatan relasional antara Anwar Usman dan Presiden Jokowi melalui ikatan ipar menjadi faktor penting yang memperkuat tuduhan pelanggaran etik tersebut.

Lebih jauh, Anwar Usman juga dituduh telah melemahkan asas independensi kehakiman dengan aktif melakukan pendekatan terhadap hakim-hakim Mahkamah Konstitusi lainnya guna mendapatkan dukungan atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini mengubah syarat usia calon presiden dan wakil presiden dengan menambahkan ketentuan pengecualian bagi tokoh yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, sehingga menguntungkan Gibran Rakabuming Raka.

Gambaran palu sidang berukuran besar yang sering diasosiasikan dengan Anwar Usman dalam berbagai ilustrasi, merepresentasikan kekuasaan absolut yang dimiliki dalam posisinya sebagai Ketua MK. Dalam hal ini, *Tempo* menginterpretasikan bahwa kekuasaan tersebut digunakan tidak secara netral, melainkan sebagai alat untuk mengarahkan hasil putusan sesuai dengan kepentingan politik tertentu.

Mengacu pada teori manipulasi politik yang dikemukakan oleh Cottam et al. (2012), terdapat tiga dimensi utama dalam strategi manipulasi: struktur, hubungan, dan prosedur. Tindakan yang dilakukan oleh Anwar Usman dapat diklasifikasikan sebagai manipulasi prosedural, di mana seorang aktor menggunakan posisinya untuk menetapkan agenda dan membingkai isu sedemikian rupa agar menguntungkan pihak tertentu. Dalam konteks ini, proses pengambilan keputusan dalam perkara nomor 90 dapat dilihat sebagai wujud konkret dari distorsi prosedural yang sarat kepentingan.

Tanda	 <p>Gambar 7 Edisi 30 Oktober - 5 November 2023 Seorang pria mengangkat anak di atas meja pidato, disaksikan oleh banyak orang, salah satunya pria gemuk di belakang.</p>
Objek	Jokowi mengangkat Gibran di atas meja pidato presiden, di depan banyak orang, disaksikan oleh Prabowo.
Interpretan	Melalui ilustrasi ini, Jokowi memperlihatkan Gibran sebagai ‘putra mahkota’ yang akan memimpin Indonesia selanjutnya. Jokowi berdiri di atas podium bermakna Jokowi menggunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk mengajak pendukungnya agar mendukung Prabowo-Gibran dalam kontestasi pilpres 2024.

Sampul majalah *Tempo* edisi tertentu menampilkan ilustrasi yang terinspirasi dari salah satu adegan ikonik dalam film *The Lion King*, yakni momen ketika tokoh Rafiki mengangkat Simba sebagai pewaris takhta. Dalam adaptasinya, *Tempo* menggantikan karakter tersebut dengan figur politik Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Prabowo Subianto. Dalam visual ini, Jokowi tampak mengangkat Gibran di atas mimbar presiden, merepresentasikan simbol transfer kekuasaan secara simbolis dari ayah kepada anak dalam sebuah struktur yang menyerupai pewarisan dinasti.

Dalam konteks film, Rafiki digambarkan sebagai penasihat spiritual yang dihormati dan memiliki kedekatan dengan Raja Mufasa. Oleh karena itu, ketika *Tempo* memvisualisasikan Jokowi dalam peran serupa, pesan simbolik yang disampaikan adalah bahwa Jokowi tidak hanya bertindak sebagai pendukung, tetapi juga sebagai arsitek utama di balik pencalonan Gibran. Visualisasi ini memberi kesan bahwa Jokowi telah menggunakan otoritas dan pengaruh institusionalnya untuk mengarahkan arus dukungan politik menuju pasangan Prabowo-Gibran.

Penggunaan elemen visual seperti podium presiden sebagai objek yang diinjak Jokowi dalam ilustrasi tersebut memperkuat kritik *Tempo* terhadap tindakan yang dinilai sebagai bentuk penyimpangan kekuasaan. Meja podium yang secara normatif berfungsi sebagai alat simbolik komunikasi negara, justru diperlakukan secara tidak semestinya. Aksi menginjak meja tersebut diinterpretasikan sebagai metafora atas praktik *abuse of*

power, yaitu penyalahgunaan otoritas untuk kepentingan politis yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi konstitusional (Al Hafis & Yogya, 2017).

Lebih jauh, *Tempo* tidak sekadar mengkritik aspek prosedural dari pencalonan Gibran melalui jalur hukum seperti Putusan MK, tetapi juga mengangkat persoalan struktural mengenai bagaimana kekuasaan digunakan untuk membangun konsensus yang artifisial. Dukungan politik yang mengalir kepada pasangan Prabowo-Gibran dilihat sebagai hasil mobilisasi dari jaringan kekuasaan Presiden Jokowi, bukan dari daya tarik elektoral yang dibangun secara independen oleh kandidat tersebut.

Dengan menggunakan pendekatan visual satiris yang sarat simbolisme, *Tempo* menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman serius akibat terkikisnya batas-batas etis antara kekuasaan eksekutif dan proses elektoral. Kritik ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap degradasi nilai-nilai demokrasi dan meningkatnya praktik-praktik politik yang lebih mengedepankan loyalitas personal ketimbang akuntabilitas publik.

Dinasti Politik Berawal dari Ambisi dari Dalam

Tanda	 <p>Gambar 8 Edisi 20-26 November 2023</p> <p>Sepasang suami istri melakukan stut motor. Pada kendaraan istri, duduk seorang anak di kursi penumpang. Vespa sang istri berbelok ke arah yang berbeda. Sang suami terlihat memanggil istrinya.</p>
Objek	<p>Jokowi dan Iriana melakukan stut motor dengan Gibran yang duduk bersama Iriana. Namun, Iriana hendak berbelok ke jalan yang berbeda sehingga Jokowi berusaha memanggilnya.</p>
Interpretan	<p>Visual Jokowi bersama Iriana dan Gibran diinterpretasikan sebagai Jokowi yang membantu Iriana untuk mewujudkan keinginannya yaitu majunya Gibran dalam kontestasi pilpres 2024.</p>

	Berbeloknya motor Iriana yang membuat Jokowi harus memanggilnya diinterpretasikan bahwa Jokowi menyadari risiko dari usaha memudahkan jalan politik Gibran, terutama sebagai calon wakil presiden.
--	--

Dalam edisi 20–26 November 2023, Tempo menyoroti dugaan keterlibatan Iriana Jokowi dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut narasi Tempo, Iriana memiliki aspirasi agar Gibran menapaki jejak karier politik sang ayah, dimulai dari jabatan Walikota Solo hingga ke tingkat nasional. Ambisi tersebut semakin menguat setelah relasi antara Presiden Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), khususnya dengan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri, mengalami ketegangan. Ketegangan ini memuncak saat Megawati menyatakan bahwa Jokowi tidak akan mencapai posisinya saat ini tanpa dukungan PDIP, pada 10 Januari 2023. Pandangan PDIP yang memosisikan Jokowi sebagai "petugas partai" dipersepsikan Tempo sebagai bentuk perlakuan yang menyakitkan bagi Iriana, sehingga memperkuat tekad politiknya.

Dalam visualisasi yang disajikan oleh Tempo, digambarkan Jokowi dan Iriana mendorong sepeda motor mogok—sebuah metafora yang merujuk pada praktik “stut motor”. Simbol ini menggambarkan bahwa tanpa peran aktif Jokowi, ambisi politik Iriana bagi putranya akan terhenti. Peran Jokowi, sebagai figur

dengan kekuatan politik eksekutif, menjadi faktor penentu agar keinginan Iriana dapat terealisasi.

Tempo juga menguraikan bahwa dukungan Jokowi terhadap Gibran telah terjadi sejak pencalonannya sebagai Walikota Solo dalam Pilkada 2020. Saat itu, demi mengamankan tiket politik Gibran, Jokowi menemui Hadi Rudyatmo, Ketua DPC PDIP Solo, untuk meminta dukungan dari partai. Jaringan politik Jokowi yang luas dengan sejumlah partai seperti PKB, Gerindra, PPP, Golkar, PAN, PSI, dan tentu saja PDIP, turut memperlancar pengusungan Gibran (Rusman et al., 2022).

Setelah Gibran berhasil terpilih sebagai Walikota, muncul aspirasi lebih besar dari Iriana agar putranya berpartisipasi dalam Pilpres 2024. Meskipun Jokowi menyadari bahwa ambisi ini berisiko menimbulkan friksi politik, terutama dengan PDIP, ia tetap memberikan dukungan karena selaras dengan kepentingan pribadinya dalam mempertahankan pengaruh politik. Salah satu bentuk nyata dukungan tersebut adalah peran kunci Jokowi dalam mendorong lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan bagi Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Kritik Sosial Tempo terhadap Isu Dinasti Politik melalui Kartun Editorial Sampul Majalah Tempo

Fenomena politik dinasti menjadi sorotan penting dalam kontestasi Pilpres 2024, menarik perhatian berbagai media, termasuk *Tempo*, yang menanggapi isu tersebut secara kritis melalui visualisasi kartun editorial. Dalam rangka

menyampaikan pesan politik, *Tempo* menggunakan pendekatan simbolik untuk menggambarkan kekhawatiran terhadap kecenderungan pelembagaan kekuasaan yang tidak demokratis. Berdasarkan kajian terhadap edisi yang terbit pada masa kampanye, dapat ditarik simpulan bahwa *Tempo* secara eksplisit menolak praktik dinasti politik yang dilakukan melalui pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Melalui kartun editorialnya, *Tempo* menyampaikan bahwa keinginan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan pengaruh politiknya melalui pencalonan Gibran dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi substantif. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dinilai sebagai bentuk manipulasi hukum yang dilakukan untuk melegalkan langkah politik Gibran. *Tempo* mengindikasikan bahwa keputusan tersebut tidak berdiri di atas landasan yuridis yang murni, melainkan dipengaruhi oleh konflik kepentingan, khususnya melalui peran Anwar Usman—adik ipar Presiden—yang saat itu menjabat sebagai Ketua MK.

Dalam sistem demokrasi presidensial, netralitas seorang presiden selama masa kampanye merupakan prasyarat normatif yang penting guna memastikan keadilan kontestasi politik. Ketika kepala negara menunjukkan dukungan eksplisit terhadap salah satu pasangan calon, maka terjadi distorsi dalam kompetisi politik karena adanya ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya simbolik dan institusional negara. *Tempo* secara kritis menangkap ketidaknetralan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan modal sosial dan politik

yang dimiliki presiden untuk keuntungan elektoral pihak tertentu.

Kritik *Tempo* kemudian ditampilkan dalam bentuk visual satiris, menggambarkan Jokowi, Gibran, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerupai tokoh-tokoh dalam serial *Peaky Blinders*. Analogi ini digunakan untuk memperkuat narasi bahwa proyek dinasti politik Jokowi dijalankan dengan cara-cara yang dianggap tidak etis, manipulatif, dan jauh dari nilai-nilai demokrasi. Gambar tersebut mengisyaratkan bahwa kekuasaan tidak lagi dilandaskan pada kinerja dan meritokrasi, melainkan pada kedekatan keluarga dan rekayasa politik.

Lebih lanjut, dalam konteks dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, *Tempo* kembali menyoroti peran dominan Presiden Jokowi. Melalui kartun editorial pada sampul depan, Prabowo dan Gibran digambarkan sebagai aktor pasif yang tidak memainkan peran signifikan dalam upaya pemenangan, seolah-olah sepenuhnya bergantung pada campur tangan Presiden. Dalam salah satu ilustrasi, Jokowi digambarkan memompa kotak suara sendirian, sementara Prabowo dan Gibran hanya berdiri memberi semangat tanpa kontribusi konkret. Kritik ini menyiratkan bahwa keberhasilan pasangan calon tersebut bukan hasil dari kerja politik mereka sendiri, tetapi semata-mata karena pengaruh dan jaringan politik Jokowi yang dominan.

Dengan demikian, melalui pendekatan visual yang kaya simbol dan kritik naratif yang tajam, *Tempo* berupaya mengungkap bagaimana kontestasi elektoral 2024 dinodai oleh praktik

oligarkis dan patronase yang membahayakan demokrasi prosedural maupun substantif di Indonesia. Kritik ini tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi juga pada sistem politik yang memungkinkan konsolidasi kekuasaan secara nepotistik di bawah legitimasi formal hukum dan institusi negara.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian ini, dapat disimpulkan bahwa *Tempo* melalui sampul majalahnya berhasil mengonstruksi isu dinasti politik dengan menggunakan keragaman semiotika yang mencakup ikon, indeks, dan simbol. Elemen-elemen seperti ilustrasi visual, palet warna, dan tipografi digunakan secara strategis untuk merepresentasikan permasalahan ini sebagai sebuah persoalan sistemik yang bermula dari dalam lingkaran kekuasaan. Ambisi untuk memperpanjang kekuasaan—terutama oleh aktor yang berada dalam struktur pemerintahan—menjadi pusat dari narasi yang dibangun *Tempo*. Terwujudnya ambisi ini sangat bergantung pada pengaruh serta hegemoni politik untuk menggalang dukungan dari berbagai elemen.

Fenomena dinasti politik dalam kontestasi Pilpres 2024 tidak berdiri sendiri, melainkan tercipta melalui kolaborasi sejumlah pihak yang memiliki afiliasi kepentingan. Kolaborasi tersebut membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan, yang berpotensi mempercepat terbentuknya struktur dinasti kekuasaan. Dalam perspektif *Tempo*, permasalahan ini tidak semata-mata dapat dilihat melalui pencalonan Gibran Rakabuming atau putusan Mahkamah Konstitusi semata.

Lebih dalam dari itu, *Tempo* menyoroti keterlibatan elite politik lainnya yang secara ideologis maupun strategis memiliki visi yang sejalan dengan Presiden Jokowi.

Tidak hanya sebagai bentuk representasi visual, sampul tersebut juga memuat kritik yang bersifat simbolik. Melalui penggunaan warna, ilustrasi, dan pernyataan-pernyataan tersirat, *Tempo* menyampaikan kecaman terhadap Presiden Jokowi atas upayanya membangun dinasti politik yang dinilai merusak tatanan demokrasi—terutama melalui instrumentalisasi lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sindiran halus juga diarahkan kepada pasangan Prabowo-Gibran yang dipotret sebagai figur pasif yang cenderung bergantung pada popularitas Presiden sebagai modal politik utama mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah di bidang ilmu komunikasi, khususnya pada ranah jurnalisme dan kajian media. Selain itu, temuan ini diharapkan dapat memicu kesadaran media nasional lainnya untuk kembali mengangkat kartun editorial sebagai medium kritik sosial-politik yang lebih ekspresif dan tajam. Untuk penelitian mendatang, pendekatan teori hierarki pengaruh media dapat digunakan guna mengeksplorasi bagaimana proses produksi dan penyuntingan kartun editorial dibentuk oleh kepentingan dan struktur organisasi media, sehingga dapat memperluas pemahaman tentang konstruksi realitas dalam jurnalisme visual.

REFERENSI

Buku

- Burton, G. (2015). *Yang Tersembunyi di Balik Media: Pengantar Kajian Media*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Cottam, M.L., dkk. (2012). *Pengantar Psikologi Politik*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Fiske, J. (2016). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Haryono, C.G. (2020). *Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Sukabumi: CV Jejak.
- Hendratman, H. (2015). *Computer Graphic Design*. Bandung: Informatika.
- Littlejohn, S. W. (2017). *Theories of Human Communication*. Eleven Edition. New York: Wadsworth Publishing Company.
- Muzakkir. (2020). *Etika Jurnalis Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media*. Jakarta: Kencana.
- Riyanda, R. (2020). *Analisis Perilaku Politik di Indonesia*. Padang: UMSB Press.
- Roikan. *Gojek, Gojlok, Momong: Studi Budaya Kreatif Kelompok Kartunis Kaliwungu (Kokkang)*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Salam, S. (2017). *Seni Ilustrasi: Esensi, Sang Ilustrator, Lintasan, Penilaian*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Sobur, A. (2015). *Analisis Teks Media*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sobur, A. (2017). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Vera, N. (2014). *Semiotika dalam Riset Komunikasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wibowo, I.S.W. (2013). *Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktik Bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi*.

Edisi Dua. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Disertasi

- Coppenolle, B.V. (2014). *Political Dynasties and Election*. [Disertasi, London School of Economics and Political Science]
- Purwaningsih, T. (2019). *Politik Kekerabatan dalam Politik Lokal di Sulawesi Selatan pada Era Reformasi (Studi tentang Rekrutmen Politik pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009)*. [Disertasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]

Jurnal

- Ahdiyati, A.N. (2021). *Analisis Semiotika Visual Pada Ilustrasi Sampul Majalah Tempo Edisi "Jerat Kedua"*. Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 12(2), 156-175.
<https://doi.org/10.25134/logika.v12i2.5492>
- Al Hafis, R.I., & Yogja, M.A. (2017). *Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik Indonesia*. Publika: Jurnal Administrasi Publik, 3 (1), 80-88.
- Akbar, A.Z. (2016). *Kritik Sosial, Pers, dan Politik Indonesia*. Unisia: Kritik Sosial, 32(17), 44-51.
<https://doi.org/10.20885/unisia.v0i32.5857>
- Permadi, H., & Wardhana, O.P.W. (2023). *Konflik Kepentingan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023*. Maksigama, 17(2), 113-129.
- Rusman, A., Rafni, A., & Suryanef. (2022). *Modal Sosial Jokowi dengan Politik Kekerabatan: Studi Kasus Pilkada 2020 di Surakarta dan Medan*. Indonesian Journal of

- Social Science Review, 1(2), 106-113.
<https://doi.org/10.21831/jis.v2i2.12>
- Setiawan, A. & Girsang, S.A. (2023). *Elektabilitas Calon Presiden: Realitas Atau Penggiringan Opini?*. Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora, 5(2), 221-227.
<https://doi.org/10.61296/jkbh.v5i2.148>
- Setiawan, T. & Chumaeson, W. *Paradoks Survei dan Elektabilitas: Quo Vadis Antara Hasil Jajak Elektabilitas dan Hasil Empiris Beberapa Pilkada di Indonesia*. Intelektiva, 4(4), 40-48.
- Majalah**
- Tempo. (15 Oktober 2023). *Skenario Culas Prabowo-Gibran*. Majalah Tempo.
<https://majalah.tempo.co/read/opini/169930/koalisi-prabowo-gibran>
- Tempo. (22 Oktober 2023). *Anwar Usman dan Skandal Mahkamah Konstitusi*. Majalah Tempo.
<https://majalah.tempo.co/read/opini/169969/skandal-mahkamah-konstitusi>
- Tempo. (12 November 2023). *Demi Demokrasi, Gibran Seharusnya Mundur Sebagai Cawapres*. Majalah Tempo.
<https://majalah.tempo.co/read/opini/170109/anak-haram-konstitusi>
- Tempo. (19 November 2023). *Cawe-cawe Ibu Negara Iriana Jokowi dalam Pemilu 2024*. Majalah Tempo.
<https://majalah.tempo.co/read/opini/170174/cawe-cawe-iriana-jokowi>
- Tempo. (14 Januari 2024). *Bisakah Jokowi Membuat Prabowo-Gibran Menang Satu Putaran?*. Majalah Tempo.
<https://majalah.tempo.co/read/opini/170672/prabowo-gibran-satu-putaran>
- Tempo. (28 Januari 2024). *Benarkah Pratikno Jadi Operator Jokowi?*. Majalah Tempo.
<https://majalah.tempo.co/read/opini/170768/pratikno-operator-jokowi>
- Peraturan**
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres. (2023).
-